



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI BARAT**

Jalan H. Abdul Malik Pattana Endeng, Simboro, Mamuju,
Sulawesi Barat WA Live Chat. 0823-9888-8900
website <https://sulbar.bpk.go.id>,
Sosial Media X, Instagram, Youtube, TikTok: @bpkrisulbar

SIARAN PERS

PENYERAHAN LHP ATAS LKPD TA 2024 KABUPATEN MAMUJU, MAJENE, PASANGKAYU DAN KABUPATEN MAMUJU TENGAH

Mamuju – Humas dan TU Perwakilan

Selasa (27/05) – Sesuai amanat Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2024 dan UU 15 Tahun 2006, BPK telah melakukan Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Mamuju, Majene, Pasangkayu, dan Kabupaten Mamuju Tengah untuk Tahun Anggaran (TA) 2024 yang ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran atas penyajian laporan keuangan.

Atas pemeriksaan tersebut, Kepala BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat, **Frider Sinaga** menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD kepada Ketua DPRD dan Bupati Kabupaten Mamuju, Majene, Pasangkayu, dan Kabupaten Mamuju Tengah atau yang mewakili.

Dalam sambutannya, Kepala BPK Sulbar menyampaikan bahwa Pemeriksaan atas LKPD TA 2024 dilaksanakan dengan tujuan untuk memberikan opini atas kewajaran LKPD dengan memperhatikan empat kriteria yaitu (1) kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP); (2) Kecukupan pengungkapan; (3) Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; dan (4) Efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI). Berdasarkan Hasil Pemeriksaan atas LKPD TA 2024 pada Kabupaten Mamuju, Majene, Pasangkayu, dan Mamuju Tengah, BPK memberikan Opini "**Wajar Tanpa Pengecualian**" (WTP) dalam semua hal yang material sesuai dengan SAP.

Namun demikian, masih terdapat beberapa permasalahan yang tidak berdampak material terhadap kewajaran penyajian LKPD yang perlu menjadi perhatian pemerintah kabupaten untuk segera diperbaiki dan ditindaklanjuti antara lain (1) Kegiatan Studi Banding dan Sosialisasi Lima SKPD ke beberapa daerah tidak sesuai ketentuan; (2) Terdapat Pengakuan Penyertaan Modal oleh Perumda Air Minum Tirta Mandar Kabupaten Majene atas Aset Kementerian Pekerjaan Umum yang belum diserahterimakan; (3) Kesalahan penganggaran Belanja Daerah TA 2024 pada Pemerintah Kabupaten Pasangkayu; dan (4) Terdapat pertanggungjawaban Belanja Barang Pakai Habis yang tidak sesuai dengan kondisi senyatanya.

Atas capaian tersebut, Kepala BPK Sulbar mengapresiasi dan mengucapkan selamat atas pencapaian opini WTP yang diraih oleh Pemerintah Kabupaten Mamuju, Kabupaten Majene, Kabupaten Pasangkayu, dan Kabupaten Mamuju Tengah dan berharap agar DPRD dan para



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI BARAT**

Jalan H. Abdul Malik Pattana Endeng, Simboro, Mamuju,
Sulawesi Barat WA Live Chat. 0823-9888-8900
website <https://sulbar.bpk.go.id>,
Sosial Media X, Instagram, Youtube, TikTok: @bpkrisulbar

SIARAN PERS

pemangku kepentingan memanfaatkan hasil pemeriksaan ini, terutama dalam melaksanakan fungsi anggaran, legislasi, dan pengawasan, serta mengingatkan agar pemerintah daerah untuk menindaklanjuti Rekomendasi hasil pemeriksaan selambat-lambatnya 60 hari setelah LHP diterima.

**SUBBAGIAN HUMAS DAN TATA USAHA
PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI BARAT**